

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Fenomena Hubungan Internasional selama ini didominasi oleh persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Akan tetapi, sejalan dengan kondisi dunia yang dianggap telah berada di era globalisasi, maka faktor kebudayaan tidak kalah pentingnya dikerjasamakan antar-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah, maka perlu disadari untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari perubahan lingkungan secara optimal. Oleh karena itu, diplomasi merupakan upaya suatu negara untuk mengubah kebijakan, tindakan, dan sikap pemerintahan negara lain melalui sikap persuasi dengan saling bertukar kepentingan.

Diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor Hubungan Internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas terkait lainnya (Barston, 2014). Diplomasi merupakan metode untuk penyampaian pesan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan dan kepentingan lain

dalam bingkai hubungan internasional, guna mencapai saling pengertian antar dua negara (*bilateral*) atau beberapa negara (*multilateral*).

Indonesia dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya atau memenuhi kebutuhan dalam negerinya, juga melakukan praktek diplomasi dengan negara lain. Hal ini bertujuan selain untuk memenuhi kepentingan nasional juga untuk mempererat hubungan kerjasama dengan negara lain. Dalam melakukan praktek diplomasi untuk mencapai kepentingan negaranya, Indonesia juga melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Indonesia tengah melakukan upaya-upaya diplomasi publik, termasuk dalam aspek diplomasi budaya dan kuliner.

Diplomasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan peranan pemerintah Indonesia saja, tetapi juga masyarakatnya. Masyarakat memiliki peranan penting dalam diplomasi publik dewasa ini, mengingat bahwa globalisasi di era ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk terlibat dalam aktivitas diplomasi ini. Masyarakat dapat berkontribusi dalam mengenalkan budaya lokal dan memberi persepsi baik atas negara asalnya di negara lain. Upaya diplomasi publik yang dilakukan, berdasarkan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri periode 2010 – 2014 yang bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi total (Kemlu, 2014).

Diplomasi total yang dimaksud dalam tujuan tersebut adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi dengan melibatkan komponen *stakeholder* dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan yaitu dengan *multitrack diplomacy* (Kemlu, 2014). Berdasarkan tujuan tersebut, Indonesia

menekankan pentingnya untuk dilaksanakan diplomasi publik di berbagai negara sebagai *soft power* demi kepentingan negara dan membina hubungan harmonis dengan negara lainnya. Dengan kata lain *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dengan mengajak dan menarik simpati orang lain, sehingga orang lain bisa bersama-sama mewujudkan keinginan negara (Shoelhi, 2011). Diplomasi publik menggunakan beberapa instrumen yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan pemerintah negara tujuan.

Indonesia dalam hal ini melakukan diplomasi publik dalam bentuk diplomasi kuliner atau yang disebut sebagai gastrodiplomasi. Diplomasi ini memberi gambaran budaya suatu negara dalam hal makanan, bagaimana makanan tersebut dibuat, disajikan dan menjadi simbol identitas suatu negara. Kekuatan koneksi makanan dan nasionalisme telah menjadikan makanan sebagai salah satu alat hubungan internasional (Chapple-Sokol, 2013). Hal tersebut juga didukung oleh beberapa faktor, yakni dalam aspek kuliner Indonesia memiliki keunggulan cita rasa yang kaya dan khas sehingga disukai oleh berbagai kalangan. Indonesia memiliki potensi kuliner yang banyak diminati diluar negeri.

Seiring dengan makin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional, aktivitas diplomasi dituntut berperan lebih signifikan dan efektif untuk kepentingan nasional. Muncul alternatif diplomasi dalam bentuk gastrodiplomasi (*gastrodiplomacy*) yaitu diplomasi yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan *brand awareness* bangsa. Meskipun ada banyak cara bagi suatu negara untuk menentukan dan

memvisualisasikan identitasnya, makanan adalah salah satu yang sangat nyata. Premis dasarnya adalah “*The best way to win hearts and mind is through the stomach*”(Nirwandy, 2014). Makanan dan simbol-simbol yang diwakilkannya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, nilai-nilai, identitas, sikap serta kelas sosial. Inilah sebabnya mengapa makanan telah menjadi bagian penting dari diplomasi tradisional sejak zaman kuno (Zhang, 2015).

Beberapa masakan Indonesia terpilih dalam daftar *World's 50 Best Food* versi CNN yaitu antara lain sate, nasi goreng bahkan rendang padang menduduki peringkat pertama pada tahun 2011 (Cheung, 2011). Berdasarkan hal tersebut, kuliner Indonesia menepati popularitas tinggi di mata masyarakat internasional. Indonesia juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah yang kemudian menjadi ciri masakan Indonesia. Hal ini membuka peluang yang sangat luas bagi masyarakat untuk lebih memanfaatkan dan mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia.

Daya tarik rempah Indonesia sangat kuat, bahkan penjajahan Eropa di Indonesia bermula dari keinginan bangsa Eropa yang ingin menguasai rempah-rempah tersebut. Namun Indonesia dinilai masih lemah dalam memanfaatkan kekuatan daya tarik kulinernya. Nama Indonesia nyaris tidak dikenal dalam peta kuliner global. Restoran yang menyediakan masakan khas Indonesia di luar negeri tidak banyak, hal tersebut sangat tidak sebanding dengan banyaknya restoran khas masakan negara lain yang ada di Indonesia.

Dalam mengkaji gastrodiplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda, perlu juga ditinjau bagaimana kondisi hubungan *bilateral* Indonesia

dengan Belanda secara historis. Melalui kolonialisasi yang dilakukan Belanda sejak tahun 1800-an, konflik dan ketegangan dapat meninggalkan persepsi negatif diantara dua pihak (Khoo, 1976). Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Belanda menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda memiliki dalih bahwa Indonesia baru dianggap merdeka setelah dilaksanakannya *Perjanjian Hague* atau yang dikenal sebagai *Konferensi Meja Bundar* yang diratifikasi pada 2 November 1949. Dalam *Perjanjian Hague* tersebut, disetujui bahwa Belanda akan memberikan kembali seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat untuk mengakhiri konflik diantara kedua belah pihak (Albert, 2010).

Pasca *Perjanjian Hague* dilaksanakan, tidak mengakhiri ketegangan diantara hubungan *bilateral* masing-masing pihak. Pada 15 Januari 1952 terjadi insiden pertempuran di Laut Aru, dimana kapal milik TNI Angkatan Laut Indonesia melawan dua kapal dari Angkatan Laut Belanda yang menewaskan korban jiwa. Pertempuran tersebut semata-mata terjadi karena adanya konflik perebutan wilayah Irian Barat. Konflik ini meredam saat PBB melalui UNTEA yang merupakan otoritas eksekutif sementara PBB untuk Irian Barat. Melalui bantuan UNTEA, pada 1 Mei 1963 secara resmi Irian Barat diserahkan kembali kepada Indonesia.

Pertempuran diantara kedua negara menyebabkan persepsi negatif masyarakat Indonesia hingga Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf Bot menyampaikan pengakuan resmi dari pemerintah kerajaan Belanda. Pernyataan tersebut berkaitan dengan penerimaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang terlaksana pada 17 Agustus 1945 (Kompas, 2005).

Pernyataan dari Menteri Luar Negeri Belanda tersebut memberi dampak positif dalam hubungan bilateral. Peristiwa lain yang memiliki pengaruh signifikan adalah pada saat kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 5 Oktober 2010.

Kunjungan kenegaraan ke Belanda ini dibatalkan karena adanya demonstrasi kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) di Belanda. Pemimpin RMS, John Wattilete yang mengajukan persidangan kilat di Pengadilan Den Haag atas tuduhan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Maluku (Lumanauw, 2016). Kejadian ini memicu kembali ketegangan diantara kedua belah pihak. Dampak negatif lain yang ditimbulkan adalah persepsi buruk dari masyarakat Belanda terhadap Indonesia dengan kondisi demonstrasi yang berakhir ricuh. Kendati demikian hubungan bilateral kedua negara yang kerap kali mengalami perubahan, memungkinkan untuk melanjutkan perbaikan hubungan diplomatik terutama dalam sektor publik dalam menghadapi tantangan diplomasi diantara kedua negara.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berpedoman pada latar belakang masalah maka perlu adanya identifikasi masalah yang terdiri dari pertanyaan yang akan dicari jawabannya, agar dapat fokus pada permasalahan yang ditetapkan untuk diteliti. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai tersebut :

1. Apa yang mendasari diplomasi Indonesia di Belanda ?
2. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia di Belanda ?
3. Bagaimana keberagaman kuliner Indonesia di Belanda ?

2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan kajian ini peneliti akan membatasi masalah dan memfokuskan masalah agar tidak meluas dan keluar konteks pembahasan. Penelitian ini akan dibatasi dalam kurun waktu aktivitas gastrodiplomasi Indonesia pada periode 2012-2015. Dimulai pada 26 Januari 2012, dikarenakan aktivitas gastrodiplomasi mulai berkembang ketika dilantiknya Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Retno Marsudi. Dubes Retno Marsudi mencanangkan program-program yang memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, salah satunya melalui aktivitas gastrodiplomasi. Penelitian ini akan berfokus kepada strategi gastrodiplomasi karena memiliki potensi yang besar.

2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, untuk mempermudah kajian permasalahan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana upaya diplomasi terhadap Belanda pengaruhnya dalam perkembangan kuliner di Belanda ?”

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan serta kegunaan dari dilakukannya penelitian ini selain sebagai syarat ujian sidang proposal skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Jurusan Hubungan Internasional, adalah sebagai berikut :

3.1 Tujuan Penelitian

Dari uraian pada identifikasi masalah maka tujuan dari penelitian ini menggambarkan tentang sesuatu yang hendak dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sarana dari diplomasi publik Indonesia melalui gastrodiplomasi.
- b. Untuk mengetahui peran dari diplomasi publik Indonesia melalui gastrodiplomasi
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya diplomasi publik yang telah dilakukan Indonesia terhadap Belanda melalui gastrodiplomasi.

3.2 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan tentang peningkatan dalam bidang pengetahuan mengenai diplomasi publik dan gastrodiplomasi. Serta bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian sejenis ini.

Bagi peneliti, Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti sendiri tentang upaya diplomasi Indonesia terhadap Belanda melalui gastrodiplomasi.

Secara Empiris, hasil dari penelitian ini untuk mengetahui upaya diplomasi publik Indonesia terhadap Belanda melalui gastrodiplomasi.